



LAPORAN

KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)

2022

**WAR
N
DRUGS**

"Speed up, never let up"

**BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI RIAU**

Dari Riau menuju Indonesia Bersinar

EXECUTIVE SUMMARY
LAPORAN KINERJA BNNP RIAU
TAHUN 2022

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau telah memperoleh target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika secara efektif di Provinsi Riau merupakan wujud capaian Fungsi Pencegahan, Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Intelijen serta Bagian Umum. Gambaran capaian sasaran strategis BNNP Riau adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi target 3 Kab/Kota, capaian 4 Kab/Kota (133,3%);
 - b. Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi target 4 Kab / Kota, capaian 4 Kab/Kota (100%);
 - c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi target 4 Kab / Kota, Capaian 4 Kab / Kota (100%);
 - d. Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada, target 1 Kawasan capaian 1 Kawasan (100%) dengan realisasi melebihi ekspektasi, turun dari Bahaya menjadi Siaga;
 - e. Nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi, target 2,5 capaian 3,12 (124,8%).
2. Fungsi Rehabilitasi dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah Petugas penyelenggaraan IBM yang terlatih, target 25 Orang capaian 30 Orang (120%)

- b. Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, target 10 Orang capaian 9 Orang (90%)
 - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi, target 5 lembaga Capaian 4 Lembaga (80%)
 - d. Jumlah Unit penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 5 Unit IBM capaian 6 Unit IBM (120%)
 - e. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Riau target 3,27 capaian 3,368 (102,9%)
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
- a. Jumlah berkas tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang Selesai (P21) target 20 berkas tercapai 40 Berkas (200%);
 - b. Jumlah Jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil di petakan target 1 Peta Jaringan tercapai 2 Peta Jaringan (200%);
 - c. Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P21 target 1 Berkas tercapai 0 Berkas (0%)
 - d. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100 tercapai 100 (100%);
 - e. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba target 100 tercapai 100 (100%).
4. Bagian Umum dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
- a. Nilai kinerja anggaran BNN target 89 tercapai 93,31 (104,8%)
 - b. Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 4 Kab/Kota , capaian 4 Kab / Kota (100%);
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau target 95 capaian 98,61 (103,8%);
 - d. Jumlah BNN Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 4 Kab/Kota capaian 2 Kab/Kota (50%).

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BNNP Riau Tahun 2021, 15 (lima belas) indikator kinerja tercapai sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) indikator kinerja tidak tercapai.

Pagu anggaran BNNP Riau dan jajaran BNN Kab/Kota tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.870.236.000,-** (Tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 17.470.169.860,-** (Tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau dengan persentase penyerapan sebesar **97,4%.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab/Kota tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN selaku Penyelenggara Negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNNP Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota Tahun 2022 yang meliputi kinerja dengan 13 (Tiga Belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, BNN sebagai lembaga pemerintah non Kementerian yang telah menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Provinsi Riau. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam upaya meningkatkan kinerja BNNP Riau telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas kinerja, BNNP Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan P4GN.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP Riau secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau ini dibuat, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Pekanbaru, 19 Januari 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Riau




Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K
Brigadir Jenderal Polisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan permasalahan kejahatan besar (*extraordinary crime*) yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengintensifkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menjadi tugas utama BNN. Dalam rangka mewujudkan program P4GN, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. BNNP Riau merupakan instansi vertikal BNN yang bertugas di wilayah provinsi Riau. Dahulu BNNP Riau, merupakan instansi pemerintah daerah provinsi Riau dengan nama Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau. Namun sejak tanggal 20 April 2011, melalui kesepakatan bersama antara pihak BNN dengan Pemerintah Provinsi Riau, BNP Riau berubah menjadi lembaga vertikal dengan nama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau.

Strategi yang dilakukan oleh BNNP Riau dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika,

Pelaksanaan Interdiksi wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, BNNP Riau sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden No. 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Visi Misi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Visi

Menjadi Lembaga yang professional, Tangguh dan terpercaya dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Riau

2. Misi

- a. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan;
- b. Mengoptimalkan Sumberdaya dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. Melaksanakan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif;
- d. Memberantas peredaran gelap Narkotika secara Profesional.

3. Kedudukan

BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di provinsi yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau yang merupakan perwakilan BNN yang berlokasi di Jl. Pepaya no. 65, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. BNNP Riau resmi menjadi lembaga vertikal sejak Tahun 2011.

4. Tugas

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. Melakukan kerja sama antara instansi pemerintah daerah, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Membuat laporan tahunan mengenai capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

5. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota);
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP;
- f. Pelayanan administrasi BNNP.

D. Struktur Organisasi

BNNP Riau terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- d. Kasie Intelijen
- e. Kasie Wastahti

Adapun stuktur organisasi BNNP Riau, yakni :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Kepala BNNP Riau | : BJP Robinson D.P. Siregar.,S.H,S.I.K |
| 2. Kepala Bagian Umum | : Febri Firmanto, S.H., M.Si. |
| 3. Kepala Bidang Pemberantasan | : Kombes Pol. Berliando, S.I.K |
| ▪ Kasie. Intelijen | : Rhama, S.H. |
| ▪ Kasie. Wastahti | : Mira Benita Maharama, SH |

Struktur Organisasi BNNP Riau sesuai dengan Peraturan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV Penutup
- Lampiran
- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Target penanganan permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% per tahun.

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi agenda nawacita, terkait dengan BNN memiliki sasaran antara lain:

1. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (nawacita keempat).
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (nawacita kelima).
3. Melakukan revolusi karakter bangsa (nawacita kedelapan).

BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020 - 2024. Renstra BNN tahun 2020 - 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2022 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2022.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (*outcome*), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNP Riau, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNP Riau dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN. Adapun Perjanjian Kinerja BNNP Riau Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2022

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,5
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang
7		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga
9		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3,27
11	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
14		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
15	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
16	Meningkatnya proses manajemen	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	89
17	kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	95
19		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil dari evaluasi dan pengukuran tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja BNNP Riau Tahun 2022 menetapkan 13 (Tiga Belas) sasaran kegiatan dengan indikator kinerja utama sebanyak 19 (Sembilan belas) indikator. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama tersebut dapat, 15 (Lima Belas) indikator tercapai, sementara 4 (Empat) indikator lainnya tidak tercapai. Disamping itu, BNNP Riau juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (Tiga Belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas) indikator yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	133,3%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab / Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
5		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi	2,5	3,12	125%

6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas penyelenggaraan IBM yang terlatih	25 Org	30 Org	120%
7		Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Org	9 Org	90%
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan layanan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	5 Lembaga	4 Lembaga	80%
9		Jumlah Unit penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit	6 Unit	120%
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3,27	3,368	103%
11	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil di petakan	1 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	200%
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21	20 Berkas	40 Berkas	200%
13	Meningkatnya pengawasan tahan dan Barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
14		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
15	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P21	1 Berkas	0 Berkas	0%
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNNP Riau	89	93,31	105%
17		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten / Kota	4 BNN Kab/Kota	100%

18	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	95	98,61	104 %
19		Jumlah BNN Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten / Kota	2 Kabupaten / Kota	50%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Riau selama kurun waktu tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNNP Riau.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-------------------------	---

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kab/Kota	4 Kab / Kota	133,3%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi;

- b. kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
- b.1 **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
- b.2 **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
- b.3 **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 133,3%

No	Satker	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kualifikasi
1	BNN Provinsi Riau	50	49,47	54,78	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Pekanbaru	50	50,37	54,87	Sangat Tinggi
3	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	50	57,31	57,14	Sangat Tinggi
4	BNN Kabupaten Pelalawan	50	53,99	54,19	Sangat Tinggi
5	BNN Kota Dumai	50	53,62	55,42	Sangat Tinggi

Dari capaian yang didapat oleh BNN Provinsi Riau, terdapat peningkatan kinerja yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana seluruh Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dicapai jauh di atas target dengan kualifikasi *Sangat Tinggi*. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba dilakukan secara masif dan berkesinambungan sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di provinsi Riau masuk dalam kategori tinggi;
2. terjalinnya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$=(\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$=(4/3) * 100\% = 133,3\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri - $\sum TIns$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri

Meskipun BNN Provinsi Riau dan jajaran berhasil mencapai target yang diberikan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. pandemi covid-19 menjadikan kegiatan sedikit terhambat karena adanya pembatasan sosial;
2. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara

sehingga pelaksanaan kegiatan beberapa kali di laksanakan penyesuaian jadwal.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. advokasi dan asistensi harus terus dilakukan pada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat untuk mewujudkan komitmen dan berperan aktif dalam percepatan upaya P4GN;
2. menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
3. koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-------------------------	--

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab / Kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah Jumlah Kabupaten / Kota yang dapat membentuk / mengadvokasi ketahanan pada lingkungan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di suatu kabupaten/kota

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan Bersinar yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2022;
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
 - c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
 - c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
 - c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
 - c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Sangat Tinggi” dan 2 Kab/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga kategori “Tinggi” sehingga dapat disimpulkan dari target 4 Kab/Kota yang berkategori tinggi dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 100%

No	Satker	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kualifikasi
1	BNN Provinsi Riau	77	71,339	92,857	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Pekanbaru	77	89,643	90,893	Sangat Tinggi
3	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	77	75,804	86,964	Tinggi
4	BNN Kabupaten Pelalawan	77	80,357	86,339	Tinggi
5	BNN Kota Dumai	77	76,43	90,982	Sangat Tinggi

Terdapat peningkatan signifikan atas capaian Indeks Ketahanan Keluarga di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dimana pada tahun 2022 seluruh BNN Kabupaten / Kota berhasil mencapai target Indeks Ketahanan Keluarga yang sudah ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah dukungan yang aktif dari unsur perangkat desa bersinar terhadap

pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$=(\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$=(4/4) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga - $\sum TIns$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga

Faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja adalah meningkatkan koordinasi antar perangkat desa bersinar yang sudah di tunjuk dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya, serta kemauan dari masyarakat desa bersinar yang diintervensi dalam pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan oleh perangkat desa nya.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Semakin meningkatkan sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. Dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba
-------------------------	--

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	4 Kab / Kota	4 Kab / Kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota sesuai dengan 5 indikator berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang meliputi adanya : yaitu Aspek Manusia; Aspek Metode; Aspek Anggaran; Aspek Sistem; dan Aspek Sarpras.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba dengan kriteria kabupaten/kota tersebut sudah bergerak sesuai dengan 5 indikator yang telah ditetapkan oleh BNN RI yaitu Aspek Manusia, Aspek Metode, Aspek Anggaran, Aspek Sistem, dan Aspek Sarpras. (penghitungan melalui kuesioner penilaian IKP yang dibagikan ke masing2 kabupaten/kota);
- b. Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
 - b.1 IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
 - b.2 IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
 - b.3 IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri
 - b.4 IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri
- c. kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di

wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kualifikasi
1	BNNP	3,2	3,73	3,67	Sangat Tanggap
2	BNNK PKU	3,2	3,85	3,47	Sangat Tanggap
3	BNNK Kuansing	3,2	3,34	3,68	Sangat Tanggap
4	BNNK Pelalawan	3,2	3,64	3,80	Sangat Tanggap
5	BNNK Dumai	3,2	3,45	3,71	Sangat Tanggap

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
2. partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
3. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

Formula yang digunakan untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	$=(\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$=(4/4) * 100\% = 100\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi kab/kota yang mandiri - $\sum TIns$ = Jumlah Target kab/kota yang mandiri

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum menyentuh Kabupaten yang belum memiliki satker BNN Kab/Kota di wilayahnya;

2. Sudah dilaksanakan pembagian zonasi kepada Kabupaten yang belum memiliki BNNK, tapi belum dapat berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran pada satker BNNK;
3. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/ lingkungan;
2. akan dilakukan Koordinasi/Komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN;
3. terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya Menjadi Waspada	1	1	100%
2	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi	2,51	3,12	124,3%

Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1)pelaksanaan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan duniausaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat (orsosmas),dan (7) hasil program yang dirasakan

masyarakat. Pengukuran terhadap status keterpulihan ini di laksanakan dengan pengukuran IKKR (Indeks keterpulihan Kawasan rawan) dengan kualifikasi sebagai berikut:

- A. IKKR 1,00 – 1,75 : Kategori A : BAHAYA
- B. IKKR 1,76 – 2,50 : Kategori B : WASPADA
- C. IKKR 2,51 – 3,25 : Kategori C : SIAGA
- D. IKKR 3,26 – 4,00 : Kategori D: AMAN

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Alternatif di kawasan rawan Perkotaan hanya dilakukan oleh BNN Provinsi Riau, dengan melaksanakan Pemberdayaan di Lingkungan Pedesaan tepatnya di Lokasi Desa Bersinar di Desa Candi Rejo, Kabupaten Indragiri Hulu. BNN Provinsi Riau juga mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2022, sehingga BNN Provinsi Riau dapat melaksanakan pemberdayaan alternatif di Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar sehingga dari target 1 Kawasan yang di berikan pemberdayaan dapat dilaksanakan di 2 Kawasan.

BNN Provinsi Riau dalam DIPA T.A 2022 menganggarkan pemberdayaan terhadap 15 (lima belas) orang warga Desa Candi Rejo melalui pelatihan life skill Menjahit. Adapun hasil pengukuran IKKR yang di laksanakan kepada masyarakat adalah **3,12** dari target **2,5** (124,3%), sedangkan status nya berhasil diturunkan dari BAHAYA menjadi SIAGA atau turun 2 tingkat. Adapun kegiatan pemberdayaan alternatif di Desa Pandau Jaya yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Riau Tahun 2022 dilaksanakan pada penghujung tahun anggaran 2022 yang diikuti oleh 15 (lima belas) orang warga desa yang di berikan pelatihan Barista Kopi. Karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di akhir tahun 2023, BNNP Riau baru dapat mengukur Capaian Kinerja seperti capaian IKKR dan indeks indeks lainnya diukur di tahun 2023.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun masyarakat sendiri yang telah jenuh dan bosan dengan image negatif mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan pada indikator kinerja

kegiatan “jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi	$=(\sum RKW / \sum TKW) * 100\%$	$=(3.12/2.5) * 100\% = 124,8\%$	- $\sum$ RKW = Jumlah Realisasi Nilai Keterpulihan - $\sum$ TKW = Jumlah Target Nilai Keterpulihan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah beberapa instansi/ lingkungan masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan. Kemudian adanya

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Org	30 Org	120%

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 25 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 30 Orang atau sebesar 120%. BNN Provinsi Riau berhasil membentuk 2 (dua) unit IBM dari target awal sebesar 1 (satu) unit IBM dan melatih 10 (sepuluh) Agen Pemulihan dari target awal 5 (lima) orang. BNN Provinsi Riau melakukan revisi dan optimalisasi anggaran yang ada sehingga bisa membentuk 2 (dua) Unit IBM dan melatih 10 (sepuluh) Agen Pemulihan dari Desa Candi Rejo dan Desa Pandau Jaya.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP	5	10	Di Atas Ekspektasi
2	BNNK PKU	5	5	Sesuai Ekspektasi
3	BNNK Kuansing	5	5	Sesuai Ekspektasi
4	BNNK Pelalawan	5	5	Sesuai Ekspektasi
5	BNNK Dumai	5	5	Sesuai Ekspektasi
	JUMLAH	25 Org	30 Org	Di Atas Ekspektasi

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$=(\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$=25/25) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum \text{RIP}$ = Jumlah Realisasi petugas - $\sum \text{TIP}$ = Jumlah Target petugas

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jarak yang jauh antara Desa bersinar yang dibentuk di Desa Candi Rejo, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Masih adanya keraguan dari masyarakat untuk mengikuti program IBM yang dilaksanakan oleh Agen Pemulihan yang dibentuk;
3. Agen Pemulihan yang di bentuk belum terlalu terampil dalam melaksanakan program pemulihan yang dilaksanakan di IBM nya.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah meningkatkan koordinasi dengan Unit IBM pada Desa Bersinar yang ditunjuk sebagai pilot project agar kegiatan terlaksana dengan baik

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	9 Orang	90%

Definisi operasional dari petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Metode pengukuran jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 orang jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dapat terealisasi sebanyak 9 orang atau sebesar 90%.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	$=(\sum RKM / \sum TKM) * 100\%$	$=(9/10) * 100\%$ $=90\%$	- $\sum$ RKM = Jumlah Realisasi petugas yang tersertifikasi - $\sum$ TKM = Jumlah Target petugas yang tersertifikasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah adanya pandemi Covid 19 dan adanya PPKM Level IV yang diterapkan di Provinsi Riau sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di awal tahun 2022. Kegiatan Uji Kompetensi dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2022.

BNN Provinsi Riau melaksanakan Uji Kompetensi Konselor Adiksi kepada 15 (lima belas) orang yang dilaksanakan pada tanggal 10 -12 Agustus 2022. Dari ke – 15 (lima belas) peserta yang mengikuti Uji Kompetensi hanya 9 (Sembilan) orang yang lulus dan kompeten. Adapun nama-nama peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Konselor Adiksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Instansi	Hasil
1	dr. Rachman Ma'aruf, Sp.KJ	RSUD Perawang	Belum Kompeten
2	Yenrisno, SKM	RSUD Rokan Hulu	Kompeten
3	Azman, SH	IPWL Satu Bumi	Belum Kompeten
4	Rizki Febrianto	RSJ Tampan	Kompeten
5	Reza Prakasa, S.Psi	Yayasan Sarahsehan	Kompeten
6	Hendra	Yayasan Siklus	Kompeten
7	Yogi Gusfiardi, S.Psi	BNNK Kuantan Singingi	Belum Kompeten
8	Basri Ropis, S.Sos	RSJ Tampan	Belum Kompeten
9	Yulisa Pipim M, S.Psi	Yayasa Sarahsehan	Kompeten

10	Dodi Wahyudi	Yayasan Siklus	Belum Kompeten
11	Aki Samsiana, S.ST	IPWL Satu Bumi	Kompeten
12	Badarali	IPWL Satu Bumi	Kompeten
13	dr. Uvirda	IPWL Satu Bumi	Kompeten
14	Jojo Helvina, S.Kom	IPWL Satu Bumi	Belum Kompeten
15	Fedi Halim	Yayasan Generasi Muda	Kompeten

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah meningkatkan kualitas dan mutu pengajaran pada pelatihan Bidang Rehabilitasi dan Bidang Rehabilitasi BNNP Riau untuk selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi, sehingga outcome petugas yang memenuhi sertifikasi kompetensi dapat terpenuhi.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga	4 Lembaga	80%

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 5 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 4 lembaga atau sebesar 80%. BNN Provinsi Riau

mengirimkan usulan penilaian SPM kepada 6 (enam) Lembaga rehabilitasi, Adapun hasil penilaiannya adalah sebagai berikut

No	Intansi	Kategori Nilai	Ket
1	Klinik Pratama BNNK Pekanbaru	A	Memenuhi SPM
2	RSUD Kab. Rohul	B	Memenuhi SPM
3	Instalasi Napza RSJ Tampan	B	Memenuhi SPM
4	Klinik Pratama BNNK Pelalawan	A	Memenuhi SPM
5	Klinik Pratama BNNK Dumai	-	Tidak Memenuhi
6	Yayasan Rumah Solid	-	Tidak Memenuhi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah adanya pandemi Covid 19 dan penerapan PPKM Level IV pada wilayah provinsi Riau, sehingga sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kualitas dan kuantitas kegiatan serta pelayanan yang diberikan. Pada Klinik pratama di BNN Kota Dumai belum memenuhi Standar Minimal Pelayanan karena belum memiliki sarana prasarana yang memadai, sehingga berpengaruh kepada nilai standar pelayanan minimal (SPM). Diharapkan kedepannya BNN Provinsi Riau melalui fungsi Rehabilitasi dapat memberikan pendampingan serta asistensi kepada Klinik Pratama BNN Kota Dumai agar dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal di tahun 2023, dan kepada Kepala BNN Kota Dumai agar melengkapi kekurangan sarana prasarana yang belum dimiliki seperti ruang konseling dan mengusulkan pelatihan untuk pegawai yang mengawaki fungsi rehabilitasi di BNN Kota Dumai agar memiliki kompetensi pelaksanaan rehabilitasi yang mumpuni.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit	5 Unit	100%

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 5 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 6 unit IBM atau sebesar 120%.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP	1	2	Di Atas Ekspektasi
2	BNNK PKU	1	1	Di Atas Ekspektasi
3	BNNK Kuansing	1	1	Di Atas Ekspektasi
4	BNNK Pelalawan	1	1	Di Atas Ekspektasi
5	BNNK Dumai	1	1	Di Atas Ekspektasi
	JUMLAH Wilayah Riau	5 Lembaga	6 Lembaga	Di Atas Ekspektasi

BNN Provinsi Riau berhasil melaksanakan pembentukan 2 (dua) IBM pada Desa Bersinar Candi Rejo di Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Bersinar Pandau Jaya di Kabupaten Kampar dari target 1 (satu) IBM yang dibentuk. BNN Provinsi Riau melaksanakan revisi dan optimalisasi dari sisa anggaran kegiatan dan

perjalanan dinas yang kemudian di alihkan untuk membentuk 1 (satu) unit IBM tambahan di Desa Candi Rejo. Kedepannya diharapkan setiap BNN Kab/Kota dapat mengoptimalkan anggaran yang ada untuk membentuk IBM di seluruh Desa Bersinar yang dibentuk. Optimalisasi anggaran yang ada dan koordinasi yang baik dengan stakeholder di Desa Bersinar merupakan faktor penting BNNP Riau dapat memenuhi target yang diberikan bahkan bisa melebihi target awal pembentukan IBM, diharapkan di tahun berikutnya optimalisasi anggaran untuk dapat melebihi target yang ditentukan bisa dilaksanakan ,tentu saja dengan tidak mengurangi kualitas dari kegiatan dan optimalisasi yang dilaksanakan sesuai dengan Standar aktifitas maupun kegiatan yang berlaku.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada indikator kinerja kegiatan “jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	$=(\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$=(6/5) * 100\% = 120\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi penyelenggara layanan rehabilitasi IBM - $\sum TN$ = Jumlah Target penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3.2	3,368	102,9

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga

residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3.2 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau dapat terealisasi sebesar 3.27 atau sebesar 102,2%.

No	Satker	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	%
1	Klinik Pratama BNNP Riau	3,27	3,27	3,368	Di Atas Ekspektasi

Jika di bandingkan dengan realisasi capaian di tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan terhadap Capaian Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Riau, sehingga dapat disimpulkan adanya kenaikan kualitas layanan dari tahun ke tahun yang diselenggarakan oleh Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Riau.

Selain Klinik Pratama BNN Provinsi Riau, Fungsi Rehabilitasi juga memberikan asistensi dan pembinaan kepada Klinik Pratama jajaran BNN Kab/Kota, dengan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Satker	Target	Realisasi	Ket
1	Klinik Pratama BNN Kota Pekanbaru	3,2	3,305	Di Atas Ekspektasi
2	Klinik Pratama BNN Kab. Kuantan Singingi	3,2	3,404	Di Atas Ekspektasi
3	BNN Kab. Pelalawan	3,2	3,628	Di Atas Ekspektasi
4	BNN Kota Dumai	3,2	3,396	Di Atas Ekspektasi

Dari 4 (empat) Klinik Pratama milik BNN Kab/Kota yang di laksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan, seluruh Klinik berhasil mendapatkan nilai di atas target yang di tentukan, dengan Klinik Pratama BNN Kab Pelalawan mendapatkan nilai tertinggi. Pelaksanaan pengukuran dilaksanakan setiap semester (6 Bulan Sekali), dengan nilai rata rata (mean) dari nilai hasil pengukuran per semesternya di ambil menjadi nilai capaian nya.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil di petakan	1	2	200%

Definisi dari Jumlah Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhasil di petakan adalah informasi jaringan yang berhasil di petakan oleh fungsi Intelijen di BNN Provinsi Riau sebagai bahan untuk pengungkapan Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah jaringan narkotika yang berhasil dipetakan. Adapun target ini hanya dimiliki oleh BNN Provinsi Riau (tidak di turunkan ke BNN Kab/ Kota).

Adapun capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

No	Satker	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket
1	BNNP Riau	1	2	2	Di Atas Ekspektasi

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, tidak ada kenaikan capaian Jaringan yang berhasil dipetakan, dikarenakan adanya Automatic Adjustmen yang dilaksanakan oleh BNN RI pada tahun 2022, dimana kegiatan Seksi Intelijen BNN Provinsi Riau dikurangi anggarannya sebesar 14 Persen dari total anggaran.

BNN Provinsi Riau berhasil mempertahankan kinerja Pemetaan jaringan jika dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga meskipun anggaran dikurangi imbas

Automatic Adjustmen dengan beberapa optimalisasi anggaran dan kegiatanm BNN Provinsi Riau tetap bisa melaksanakan pemetaan jaringan dengan optimal.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
-------------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	%
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	20 P21	33 P21	40 P21	200%

Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah berkas kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap dan diselesaikan.

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

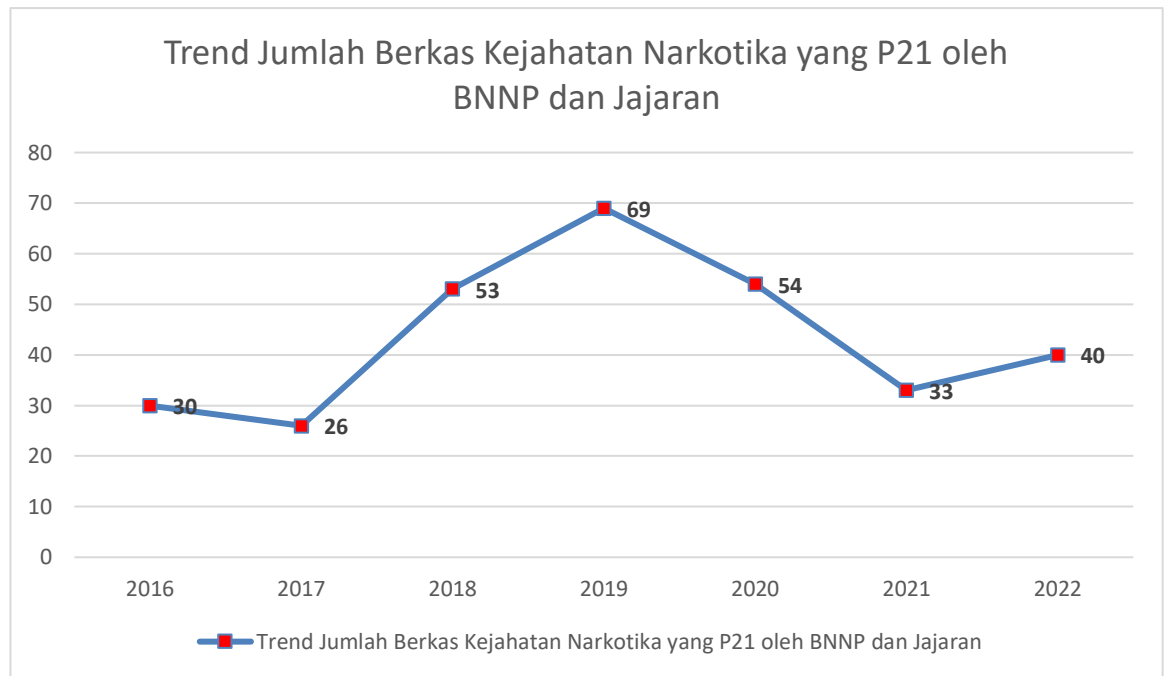
No	Satker	Target DIPA	Berkas P21 2021	Berkas P21 2022
1	BNNP	12 Berkas	18 Berkas	27 Berkas
2	BNNK PKU	3 Berkas	5 Berkas	4 Berkas
3	BNNK Kuansing	1 Berkas	-	2 Berkas
4	BNNK Pelalawan	1 Berkas	4 Berkas	3 Berkas
5	BNNK Dumai	3 Berkas	6 Berkas	4 Berkas
	TOTAL	20 Berkas	33 Berkas P21	40 Berkas P21

Dari Nilai total Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 (diselesaikan) oleh BNN Provinsi Riau dan BNNK Jajaran adalah sebanyak 40 Berkas atau dapat diartikan mencapai 200 % dari total target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja 2022 sebanyak 22 Berkas (over prestasi).

IKK Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (tahun 2016-2022) adalah sebagai berikut :

No	Satker	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	BNN Provinsi Riau	24	18	36	48	38	18	27
2	BNN Kota Pekanbaru	3	4	5	8	6	5	4
3	BNN Kab. Kuantan Singingi	1	1	0	0	0	0	2
4	BNN Kab. Pelalawan	2	3	6	6	4	4	3
5	BNN Kota Dumai	-	-	6	10	6	6	4
	TOTAL	30	26	53	69	54	33	40

Dari data di atas, dapat disimpulkan selama tahun 2016-2022, kinerja Bidang Pemberantasan BNNP Riau dan jajaran selalu mencapai target dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2017 s/d 2019. Hal ini dibuktikan dengan Overprestasi yang didapat dari segi pengungkapan dan penanganan kasus yang di laksanakan oleh Bidang pemberantasan di BNNP Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota. Penurunan capaian kinerja terjadi di tahun 2020 dan 2021 dapat dimaklumi karena adanya pandemi Covid 19 dan penerapan PPKM Level IV di wilayah Provinsi Riau serta refocusing anggaran, sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat maksimal dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2022 BNN Provinsi Riau dan jajaran berhasil meningkatkan capaian kinerja berkas yang selesai dan P21, terutama di Satker BNNP Riau dan BNNK Kuantan Singingi bisa berkinerja lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun penyebab satker BNN Kota pekanbaru, BNN Kab pelalawan dan BNN Kota Dumai sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan kinerja tahun sebelumnya karena adanya Automatic Adjustment, dimana anggaran fungsi pemberantasan si satker BNNK di laksanakan pemblokiran dan pemotongan anggaran di akhir tahun. Untuk grafik capaian realisasi berkas narkoba yang selesai dapat ditampilkan pada grafik dibawah ini:



Meskipun demikian, secara target kinerja BNNP Riau dan jajaran tahun 2022 telah mencapai Target. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab/ Kota adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Polda Riau dan Polres Jajaran, Kejaksaan Tinggi dan jajaran Kejaksaan Negeri, TNI , Bea Cukai dll)
2. Kinerja yang baik dari para anggota bidang pemberantasan baik di lingkungan BNNP maupun BNNK.
3. Komitmen yang baik dari pimpinan satuan kerja untuk sapu bersih peredaran Gelap Narkotika di wilayah hukum provinsi Riau.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Anggota Bidang Pemberantasan, mulai dari BNN Provinsi sampai ke BNN Kab/Kota.
2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Reserse dan Penyidikan bagi anggota Bidang Pemberantasan untuk peningkatan kompetensi bagi Penyidik BNN Provinsi Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota.

3. Penambahan personil yang memiliki sertifikasi Penyidik baik PNS/Polri untuk BNN Kab/Kota terutama BNN Kab Kuantan Singingi dan BNN Kabupaten Pelalawan
4. Pemberian Pendidikan Analis Intelijen dan Penggunaan IT bagi anggota Bidang Pemberantasan di BNN Provinsi Riau.
5. Peningkatan peralatan dan Sarana Prasarana Intelijen dan Persenjataan.
6. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Instansi Penegakan Hukum yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
-------------------------	---

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	0	0

Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 adalah Jumlah kasus perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang selesai ditangani oleh BNN Provinsi Riau. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil diungkap dan diselesaikan.

Pada tahun anggaran 2022, dari target sebanyak 1 berkas TPPU yang harus di selesaikan, kasus TPPU yang berhasil ditangani oleh BNN Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) Berkas Kasus, namun Berkas TPPU tersebut belum P21 / Selesai.

Adapun Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga menjadi faktor kegagalan BNN Provinsi Riau mencapai target adalah:

1. Pandemi Covid 19 sehingga membatasi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2021;
2. Masih terbatasnya SDM yang piawai dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan kinerja dan capaian target di masa depan adalah:

1. Pemberian Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penyidikan dan Penyelidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
2. Peningkatan Kompetensi bagi SDM Bidang Pemberantasan di Daerah melalui pemberian Pendidikan dan Pelatihan mengenai tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
2	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	100	100%

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur,

kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Adapun BNN Provinsi Riau dan BNN Kab / Kota jajaran belum ada yang memiliki ruang tahanan yang sesuai standar, sehingga tahanan hanya ditahan di BNNP/BNNK selama 6 (enam) hari pertama untuk penyidikan, selebihnya tahanan akan dititipkan di Rutan milik Kemenkumham ataupun Polda/Polres setempat.

Untuk penghitungan besaran indeks Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dihitung dengan metode sebagai berikut:

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 10

Dengan Rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{\text{Jumlah Seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah Seluruh Tahanan}} \times 100\%$$

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{54}{54} \times 100 \% : 100\%$$

Hasil Indikator Kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah: 100%

Adapun detil tahanan Kejahatan Narkotika yang berhasil di ungkap oleh BNN Provinsi Riau dan Jajaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Laki-laki	Perempuan	Total
1	BNNP	37 Org	1 Org	38 Org
2	BNNK PKU	4 Org	1 Org	5 Org
3	BNNK Kuansing	4 Org	-	4 Org

4	BNNK Pelalawan	3 Org	-	3 Org
5	BNNK Dumai	4 Org	-	4 Org
	TOTAL	52 Org	2 Org	54 Org

Dari 54 (lima puluh empat) orang tahanan di atas, tidak ada yang kabur, cidera serius dan meninggal akibat kelalaian petugas.

Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba, adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkoba dan non-narkoba. Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Adapun Barang bukti yang berhasil di sita oleh BNN Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

No	Satker	Shabu	Ekstasi	Ganja	Lainnya
1	BNNP	34.138,64 Gr	2016 Btr	235,08 Gr	-
2	BNNK PKU	93,77 Gr	-	-	-
3	BNNK Kuansing	3,08 Gr	-	-	-
4	BNNK Pelalawan	0,5 Gr	-	-	-
5	BNNK Dumai	513,38 Gr	-	104,21 Gr	-
	TOTAL	34.749,36 Gr	2016 Btr	339,29 Gr	-

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a_1 = untuk barang bukti 1

a_2 = untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_y}{y} \times 100\%$$

Dengan Y: Jumlah BA (Penitipan) dan Asumsi BA Penitipan = Jumlah Ba Keluaran
Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{56}{56} \times 100 \% : 100\%$$

Hasil Indikator Kinerja Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba adalah: 100%

Indikator Kinerja Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dan Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah, karena pada tahun sebelumnya target IKK ini adalah laporan dan bukan layanan.

Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah kerjasama yang baik antara BNNP dan BNNK dengan instansi terkait (POLDA ,Kejaksaan, Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham/LAPAS/RUTAN)

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait.
2. Berkoordinasi dengan BNN Pusat dan Dir Wastahti untuk penatalaksanaan Pengawasan Tahanan dan Barang bukti agar terlaksana sesuai standar yang berlaku.

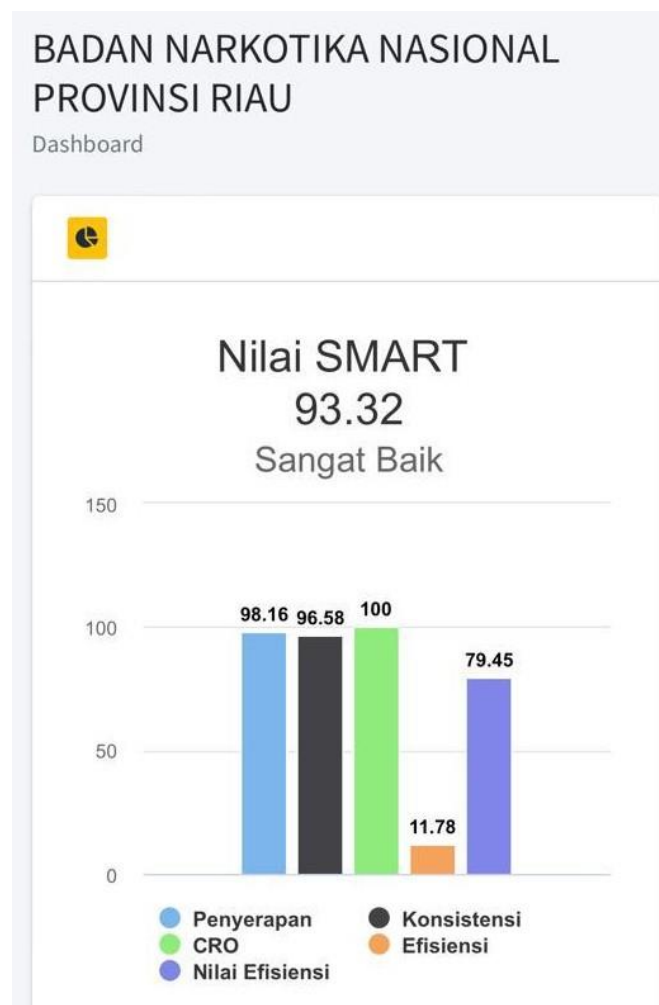
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-------------------------	---

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	89	93,31	104,8%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 89 untuk nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau dapat terealisasi sebesar 93,31 atau sebesar 104,8%.



Nilai Kinerja Anggaran BNNP Riau belum menacapai dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN, disebabkan adanya beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target seperti di Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan sehingga berpengaruh kepada target kinerja Anggaran sakter secara keseluruhan. Adanya Pandemi Covid 19 dan penerapan PPKM Level IV di wilayah Provinsi Riau sedikit banyak juga berpengaruh terhadap gagal tercapainya beberapa indikator kinerja. Adanya hibah dari Pemerintah Provinsi Riau melalui APBDP 2022 memberikan tambahan capaian output / RO di beberapa kegiatan seperti kegiatan Pemberdayaan Alternatif, dimana ditargetkan diberikan Pemberdayaan alternatif di 1 (satu) Kawasan namun bisa direalisasikan di 2 (dua) Kawasan Rawan.

Adapun upaya perbaikan kinerja dari seluruh Satker yang akan dilaksanakan kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menetapkan target kinerja terlalu tinggi di awal penyusunan Penetapan Kinerja, sehingga untuk tahun kedepan BNNP Riau akan menetapkan target sesuai kemampuan kinerja yang bisa di dapatkan sesuai dengan Rencana Strategis BNN RI 2020 – 2024.
2. Memperkuat koordinasi dengan pelaksana kegiatan di Bidang dan Pembina Fungsi untuk monitoring target target kinerja yang kemungkinan mencapai target.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(88,37/91) * 100\%$ $=97,109\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	100%

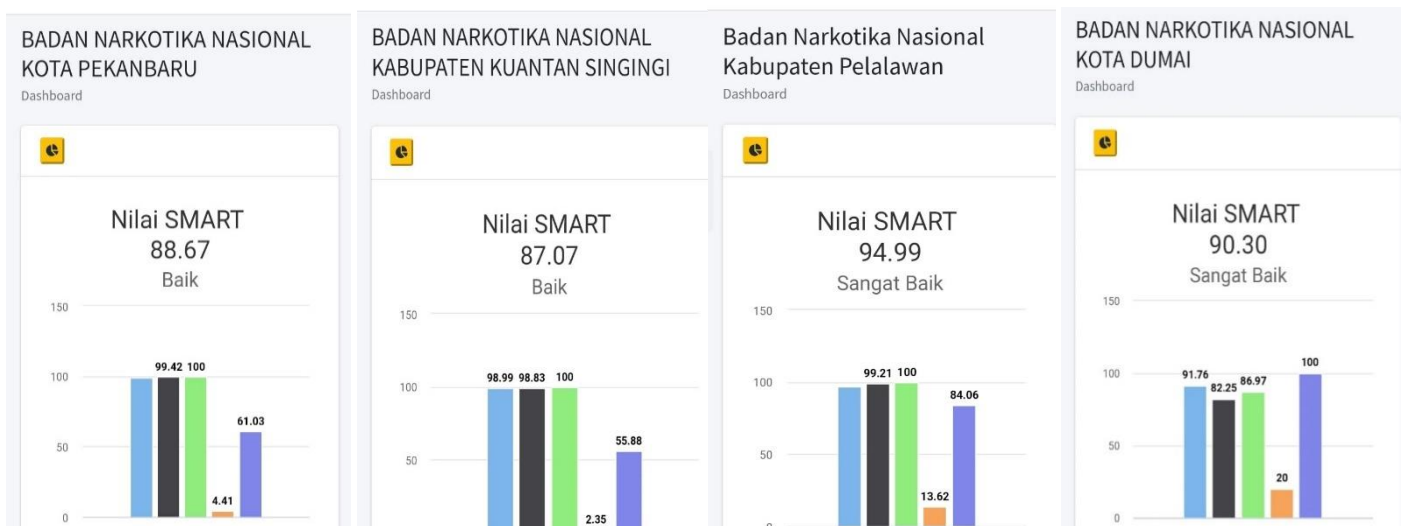
Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau

No	Satker	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket
1	BNNK PKU	88	87,14	88,67	Di Atas ekspektasi
2	BNNK Kuansing	87	85,48	87,07	Di Atas ekspektasi
3	BNNK Pelalawan	89	88,36	94,99	Di Atas ekspektasi
4	BNNK Dumai	87	77,60	90,3	Di Atas ekspektasi

dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target diukur dengan cara mendaftarkan jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA) memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja T.A 2022.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai target, seluruh BNN Kab/ Kota mencapai target NKA yang diperjanjikan di Penetapan Kinerja T.A 2022.



Terdapat kenaikan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang di dapatkan oleh BNN Provinsi Riau dan BNN Kab/Kota Jajaran jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya perbaikan kinerja dari seluruh Satker dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2022 menjadi faktor penentu keberhasilan BNNP Riau dan Jajaran dalam mencapai target Nilai Kinerja Anggaran yang ditentukan di Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-------------------------	--

A. Capaian Kinerja IKPA

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	95	98,61	103,8%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 95 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), BNN Provinsi Riau dapat mencapai realisasi IKPA sebesar 98,61 atau sebesar 103,8%.

Terdapat Kenaikan kinerja bila dibandingkan dengan Nilai IKPA tahun 2021 sebesar 98,29, hal ini merupakan wujud komitmen dari BNN Provinsi Riau untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mendapatkan nilai IKPA yang tinggi.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(98,61/94) * 100\%$ $=103,8\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai IKPA

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kab/Kota	2 BNN Kab/Kota	50%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau yang memiliki nilai IKPA sebesar 95.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai 94 dapat terealisasi sebesar 4 BNN Kab/Kota atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket
1	BNNK PKU	95	99,35	98,55	DI Atas ekspektasi
2	BNNK Kuansing	95	98,44	98,67	DI Atas ekspektasi
3	BNNK Pelalawan	95	96,22	89,68	Tidak Tercapai
4	BNNK Dumai	95	94	94,10	Tidak Tercapai

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	$=(\sum RTB / \sum TTB) * 100\%$	$=(2/4) * 100\% = 50\%$	- $\sum RTB$ = Jumlah Realisasi BNN Kab/Kota mencapai target - $\sum TTB$ = Jumlah Target BNN Kab/Kota mencapai target

Faktor yang mempengaruhi kegagalan yang dialami oleh BNN Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pada BNN Kabupaten Pelalawan, nilai IKPA rendah karena adanya kelengkapan data kontrak yang terlambat di lampirkan saat pengajuan LS ke KPPN, sehingga mempengaruhi penilaian pada Data Kontrak.
2. Pada BNN Kota Dumai, nilai IKPA tidak mencapai target karena adanya pengembalian akibat temuan audit tahun berjalan pada satker BNN Kota Dumai, sehingga pengembalian anggaran melalui aplikasi SIMPONI tercatat kembali pada aplikasi OM SPAN dan SAKTI, sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Realisasi Anggaran

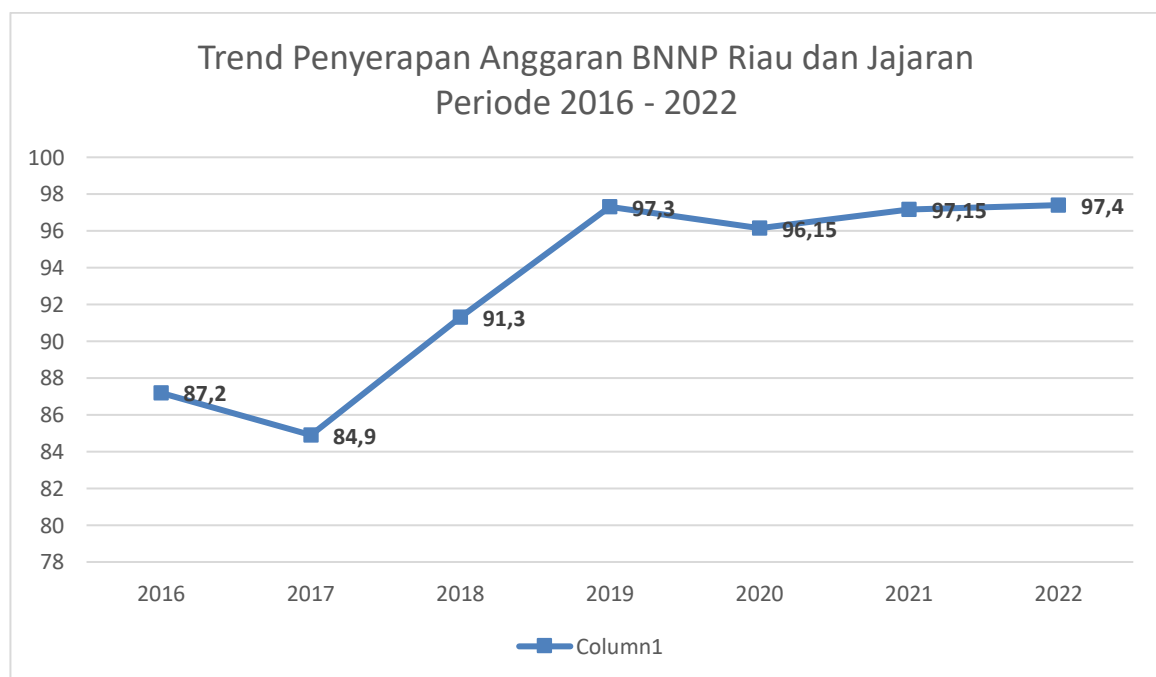
Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai realisasi anggaran BNNP dan BNNK/Kota di Provinsi Riau tahun 2022, yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp) (s.d 31 Des 2022)
BNNP RIAU	10.340.097.000	10.162.075.687	98,28	178.021.313
BNN Kota Pekanbaru	1.906.631.000	1.891.704.703	99,2	14.926.297

BNN Kab Kuantan Singingi	1.876.135.000	1.825.111.713	97,3	51.023.287
BNN Kab. Pelalawan	1.755.385.000	1.700.387.610	96,9	54.997.390
BNN Kota Dumai	1.991.988.000	1.827.890.147	91,7	164.097.853
TOTAL	17.870.236.000	17.470.169.860	97,4	400.066.140

Tahun 2022 BNNP Riau dan jajaran BNN Kab/Kota di bawahnya mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.870.236.000,-** (Tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 17.470.169.860,-** (Tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau dengan persentase penyerapan sebesar **97,4%**

Selama kurun waktu 2016 – 2022, tren penyerapan anggaran dari BNN Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab Kota dapat dilihat di diagram di bawah ini:



Selama kurun waktu 2017 – 2019, trend penyerapan anggaran BNN Provinsi Riau dan seluruh BNN Kab / Kota mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 penyerapan sebesar 96,15 bisa di maklumi karena adanya

pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan wilayah Provinsi Riau. Periode anggaran 2021 – 2022 trend penyerapan anggaran naik dan sudah menyamai trend penyerapan sebelum pandemi Covid 19, hal ini dikarenakan dengan adanya vaksinasi secara luas, pelonggaran pembatasan masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana maksimal terutama di Triwulan III dan IV dimana masa PPKM sudah mulai dilonggarkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Tahun 2022, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Riau sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Riau telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024 sesuai Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar BNNP Riau yaitu

- 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 2) Bidang Rehabilitasi

- 3) Bidang Pemberantasan

serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNP Riau dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNP Riau beserta jajaran BNN Kab/Kota dibawahnya pada tahun 2022 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan yang tercantum pada 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNP Riau.

Segala rencana perbaikan kedepan untuk tahun berikutnya diharapkan agar dapat dilaksanakan sehingga setiap tahunnya kinerja BNN Provinsi Riau semakin lebih baik. Partisipasi dari seluruh masyarakat, jajaran pemerintah, swasta, penegak hukum, dan seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program P4GN di provinsi Riau sehingga cita-cita bersama dalam mewujudkan Riau Bebas Narkoba dan Indonesia Bersih dari Narkoba dapat terwujud.

LAMPIRAN